



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP
HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) SYARIAH UPS PAYUNG SEKAKI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

**Suci Rahmawati
NIM: 11427203865**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Ini Berjudul *Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru*, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Rahmawati
 Nim : 11427203865
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan bahan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020
 Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SH, MH.
 NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP
HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS PAYUNG SEKAKI PEKANBARU

Nama Penulis : SUCI RAHMAWATI
NIM : 11427203865
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 11 Mei 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,
Tim Penguji

2020



1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Yuni Harlina, M.Sy
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Nur Hidayat, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Dr. Abu Samah, MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru. Kejadian yang dialami oleh karyawan Pegadaian Ups Payung Sekaki yaitu Wenni Afriyana Siregar yang akan mengantarkan barang hasil gadai ke Kantor Pegadaian di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru di tengah jalan karyawan ini di pepet oleh dua OTK (Orang Tidak Dikenal) yang membawa senjata tajam dan berhasil merampas serta membawa kabur barang jaminan gadai tersebut. Akibatnya pihak Pegadaian mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dalam hal ini, pihak pegadaian bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1157 KUHPerdara dan juga dengan ketentuan dari pihak Pegadaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap hilangnya barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru, dan mengetahui akibat hukum perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan, Adapun metode pengumpulan data adalah melalui observasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dan studi pustaka yaitu mengumpulkan informasi yang didapat dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi dan lainnya. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif.

Dari hasil penelitian ini terhadap tanggung jawab pihak PT. Pegadaian terhadap hilangnya barang nasabah bisa diselesaikan dengan baik walaupun dalam prosesnya tidak semua nasabah yang menerima dengan bentuk pertanggung jawaban yang di berikan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Dengan adanya peristiwa hilangnya barang jaminan nasabah, maka akibat hukumnya yaitu batalnya suatu perjanjian bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya batal bukan demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak PT. Pegadaian (PERSERO) bertanggung jawab terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan nasabah yaitu dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang dan bentuk penggantianannya bisa berupa nominal atau diganti dengan barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak Pegadaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru”**. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan penulis, walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Adapun maksud dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Terimakasih untuk seluruh keluarga , yang penulis sayangi dan hormati ayahanda Dedi Trialdo, ibunda Teti Susilawati kakak Eka Siti Wahyuni dan Dwi Ade Putri S.Sos yang telah memberikan pengorbanan, dorongan semangat serta bimbingan atau segalanya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M. A. Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M. Pd. Dan Wakil Rektor III Drs. Promadi, MA. Ph.D.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, Beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, Mag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memebrikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Firdaus, SH, MH. Yang juga merupakan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kastulani, SH, MH. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Hj. Rasdanelis, S.Ag., SS., M.Hum selaku Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak Darmawan Tia Indrajaaya, M. Ag selaku Ketua Penguji, Ibu Yuni Harlina, M. Sy selaku Sekretaris Penguji, Bapak Dr. Abu Samah, MH selaku Penguji I dan Bapak Nur Hidayat, SH., MH selaku Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai Tim Penguji Munaqasyah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibuk Zulkhairat, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki, Bapak Arsil selaku Liaison Officer (LO) PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru, Ibu Wenni Afriyana Siregar selaku Kasir PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Harapan Raya Pekanbaru dan seluruh staff yang telah banyak membantu untuk memperoleh informasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terima kasih untuk Sahabat penulis Makmur, SH, Dita Wulanti, SH, Triana Angelia, SH, Nona Andini, SH, Sarinda Gusti, SH, Pran Raja Parima, SH, yang telah membantu, berperan dan memberikan masukan kepada penulis di dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia Nya kepada kita semua. Allahumma Amin.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik dan saran serta masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2020
penulis,

SUCI RAHMAWATI
NIM. 11427203865

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Pegadaian	15
B. Visi dan Misi Pegadaian	18
C. Struktur Organisasi	19
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab	25
B. Tinjauan Umum Perjanjian	30
C. Tinjauan Umum Gadai	39
D. Tinjauan Umum Jaminan	44
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru	56
B. Akibat Hukum Perjanjian Gadai PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru	63



DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan manusia yang lain untuk saling berinteraksi dalam kehidupan. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Meskipun demikian, manusia merupakan individu mandiri yang mempunyai kepentingan dan kehendak yang terkadang sama dan sering pula berbeda.¹

Dalam hubungan antar manusia persamaan ataupun perbedaan kehendak dan kepentingan merupakan hal yang lumrah terjadi. Dalam hal memenuhi suatu kepentingan seringkali membutuhkan orang lain untuk membantu pemenuhan tersebut. Salah satunya dengan gadai. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam.

Perum Pegadaian (Perusahaan Umum Pegadaian) merupakan lembaga perkreditan non Perbankan yang dikelola pemerintah yang kegiatan utamanya memberikan pinjaman uang atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat

¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.15

sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di Pegadaian.

Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara, adalah suatu hak yang diperolehkannya berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya.²

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.³

Selain itu beberapa perumusan tentang gadai juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut:

- a. Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian aksesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah

² Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.35

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

- b. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.⁴

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁵

Perjanjian kredit gadai antara penerima gadai (Perum Pegadaian) dan pemberi gadai (Nasabah) ini dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK), yang mana SBK tersebut juga berfungsi sebagai kuitansi. SBK merupakan bentuk Perjanjian Standar (baku) yaitu suatu persetujuan tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak mengenai suatu hal yang isinya telah ditentukan secara standar (baku).

Pada saat perjanjian ini ditandatangani nasabah maka ia harus menyerahkan jaminan kepada Perum Pegadaian. Jaminan tersebut berupa benda

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Seroengan, 1960), h.152

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.233

bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, elektronik dan sejenisnya. Jaminan ini penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi Perum Pegadaian dalam mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Diadakannya suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik.

Hak adalah wewenang yang diberikan hukum subyektif kepada subyek hukum. Kewenangan untuk berbuat sesuatu itulah yang disebut hak. Dengan kata lain hak adalah tuntutan sah, agar orang lain bersikap tindak dengan cara-cara tertentu. Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antar pihak. Dimana diharuskan adanya pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Hal ini mengartikan bahwa salah satu pihak berhak menuntut atas pemenuhan prestasi tersebut, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi yang dilakukan oleh pihak sebelumnya. Pasal 1234 KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban (prestasi) tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa: Barang, jasa (berupa tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi/ ditunaikan oleh debitur kepada kreditur yang terdapat di dalam setiap perikatan. Dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan obyek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu.

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi disebut dengan wanprestasi yang berarti kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi) dalam suatu perikatan dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan karena kesalahan kreditur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;
- b. Disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure) atau di luar kemampuan kreditur.⁶

Tidak dipenuhinya prestasi oleh kreditur dikarenakan force majeure adalah keadaan dimana kreditur tidak dapat melaksanakan/menunaikan prestasi disebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan kreditur sehingga kreditur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut.

Dalam hal ini kreditur tidak memenuhi prestasi bukan karena kealpaan atau kelalaian ataupun kesengajaan, melainkan karena terjadinya force majeure sehingga kreditur tidak dapat dijatuhi hukuman.

⁶ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, h.120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu salah satunya adalah gadai.⁷ Mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang mana definisi gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari penerima gadai-penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari definisi gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata jelas terlihat bahwa gadai adalah suatu hak atas benda bergerak milik orang lain, yang tujuannya hanya sebagai jaminan tertentu bagi suatu pemenuhan suatu tagihan dari macam apapun. Jadi benda itu merupakan jaminan pelunasan bagi pemenang gadai.

Kejadian dialami karyawan Pegadaian, Jalan Dharma Bakti (Sigunggung), Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, bernama Wenni Afriyana Siregar. Saat itu korban Wenni Afriyana Siregar yang akan mengantar barang hasil gadai ke Kantor Pegadaian Jalan Ahmad Yani Pekanbaru yang berupa emas, dua handphone dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditaruh di dalam tas dan dibawa dengan sepeda motor. Namun saat melintas di Jalan Gotong Royong Kecamatan Payung Sekaki, korban di pepet oleh dua OTK (Orang Tidak

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Bandung: Liberty, 1981), h. 96.

Dikenal) menggunakan senjata tajam menyuruh agar korban Wenni Afriyana Siregar berhenti. Lalu OTK (Orang Tidak Dikenal) tersebut merampas dan membawa kabur barang jaminan gadai tersebut. Akibat kejadian itu, pihak Pegadaian mengalami kerugian hingga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁸

Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang itu dan bagaimana pihak Pegadaian mengatasi permasalahan tersebut sehingga para nasabah tidak merasa dirugikan. Para nasabah tentu tidak ingin merasa dirugikan atas kejadian itu dan menuntut pihak Pegadaian untuk mengganti kerugian para nasabah. Hal ini menjadi penting karena PT. Pegadaian (Persero) didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TANGGUNG JAWAB PIHAK PT.PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS PAYUNG SEKAKI PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang bagaimana tanggung jawab atas hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru.

⁸ Data Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Payung Sekaki Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pihak PT. Pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian gadai PT. Pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak PT. Pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian gadai pada PT. Pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam memahami dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan nasabah.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti terhadap manfaat dalam proses dan pelaksanaan tanggung jawab oleh pihak pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai masalah dan penyelesaian perjanjian yang dalam proses pelaksanaan tanggung jawab pihak Pegadaian atas hilangnya barang jaminan nasabah.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian ilmiah merupakan investigasi fenomenal secara sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antara fenomena yaitu penelitian yang dilakukan langsung lapangan dan studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara.⁹ Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

2) Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru. Adapun alasan penulis

⁹J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003,h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih lokasi ini adalah karna penulis ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah yang hilang di PT.

Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru

3) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru

4) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁰ Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian. Sampel sejumlah anggota yang dipilih dari poulasi.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Pengelola PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru sebanyak 1 orang, Kasir PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru sebanyak 1 orang, dan nasabah pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru sebanyak 8 orang nasabah.

Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan penulis yaitu tehnik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), hlm. 147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan tertentu dari peneliti.¹² Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Responden	Populasi	Sampel	Persentase
Pengelola PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru	1	1	100%
Kasir PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki	1	1	100%
Nasabah PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki	8	8	100%
Jumlah	10	18	100%

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki

5. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklarifikasikan sumber data dalam jenis, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi, dan wawancara dengan karyawan dan PT.Pegadaian(persero) Syariah Unit Payung Sekaki Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data Skunder, adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

¹²Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹³
- b. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.¹⁴ Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang disusun secara terperinci yang langsung diajukan kepada karyawan dan nasabah gadai emas.
- c. Studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, disertai peraturan-peraturan ketetapan-ketetapan, dan lain sebagainya.

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karna dari analisis ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Galia Indonesia, 2005), h. 175

¹⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2004), h. 180

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif komparatif* dengan cara mendeskripsikan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan.

Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Tanggung Jawab Atas Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang teoritis mengenai pengertian tanggung jawab, akibat hukum, perjanjian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asas-asas hukum perjanjian, tinjauan umum tentang gadai, dan jaminan gadai.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang tanggung jawab pihak PT. Pegadaian (Persero) terhadap hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pegadaian

a. Sejarah PT.Pegadaian (Persero)

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Lenning yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia tanggal 20 Agustus 1746 pada saat Inggris mengambil alih pemerintahan (1811-1816) Bank Van Lenning milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat.¹⁵

Pada saat Belanda berkuasa kembali dikeluarkan Staatblad No. 131 tanggal 2 Maret 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh Pemerintah dan beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbarui dengan PP.No.103/2000 berubah menjadi PERUM hingga sekarang. Bagian perubahan telah berubah fungsi namun pihak

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h.389



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasta masih tetap melakukan kegiatan aktivitas sampai sekarang dibidang jasa Pegadaian.¹⁶

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun. Manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah dan bawah. Kantor pusat Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang.

b. Sejarah PT.Pegadaian (persero) Syariah Unit Payung Sekaki Pekanbaru

Dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnanya menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang perbankan syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat islam yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya Perbankan dan Lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi Pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non Bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar Rahnu*, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

¹⁶ Ibid, h.390



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian *musyarakah* ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian syariah, karna untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dan pelayanan jasa gadai.

PT.Pegadaian Syariah Unit Payung Sekaki adalah bentuk dari pengembangan pembukaan kantor cabang yang menjawab kebutuhan konsumen muslim yang menginginkan transaksi pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan syariah, Pegadaian Syariah Unit Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 November 2008 yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan wilayah Perum Pegadaian Pekanbaru No. 402/OP1.18001/2008, tentang pembukaan kantor Cabang Perum Pegadaian Syariah.¹⁷

¹⁷ Rahman Arif, Pimpinan Unit PT.Pegadaian (persero) Syariah Unit Payung Sekaki Pekanbaru, Wawancara , 02 Desember 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Pegadaian

a. Visi Perum Pegadaian

Pegadaian pada tahun 2015 menjadi “*champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai bagi masyarakat. Untuk memberi kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil karna terbukti bahwa mereka inilah yang dapat bertahan menghadapi krisis global yang melanda dunia tahun 1997 yang lalu. peranan usaha mikro dan kecil perlu lebih ditingkatkan dengan ketersediaannya pendanaan yang cepat dan aman yang disediakan Pegadaian.

b. Misi Perum Pegadaian

Perum Pegadaian merumuskan visi perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan digarap sasaran pasar yang dituju dan upaya meningkatkan kemanfaatan Perum Pegadaian. Rumusan misi Perum Pegadaian dinyatakan dengan kalimat:

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro dan menengah atas dasar hukum gadai.
2. memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan konsisten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

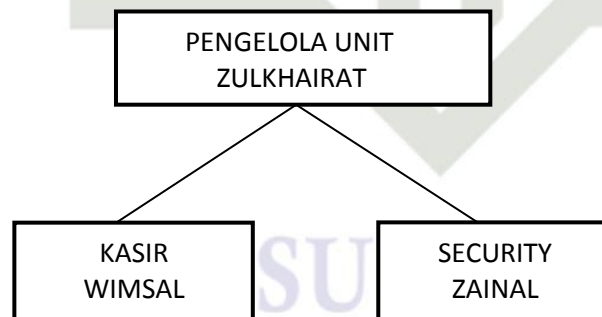
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.¹⁸

Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi dapat dianggap sebagai wajah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui fungsi dan tugas dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan struktur organisasi ini dimaksudkan agar wewenang dan tanggung jawab dapat dibagi sehingga suatu pekerjaan mulai dari awal sampai akhir tidak dikerjakan oleh satu orang, agar pembagian wewenang dan tanggung jawab ini dapat menciptakan suatu sistem pengawasan intern diperusahaan tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI PT.PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS PAYUNG SEKAKI PEKANBARU



Sumber: PT.Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru

¹⁸ [Http://Pegadaian.Co.Id/Visi](http://Pegadaian.Co.Id/Visi) dan Misi PT.Pegadaian (Persero). Php, Diakses Pada tanggal 04 Desember 2019



Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Payung Sekaki

Pekanbaru terdiri dari :

1. Pimpinan Unit

Pimpinan cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pimpinan cabang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan oprasional usaha gadai dan usaha lain,
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan oprasional UPS
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan oprasional kantor cabang.
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana , serta kebersihan dan ketertiban kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

Fungsional

a. Tugas Kasir

- 1) Merangkap transaksi kasir;
- 2) Pengelola tata usaha (mengarsip dokumen atau pengarsipan);
- 3) menyimpan barang jaminan nasabah ditempat yang aman dan baik.

b. Tugas Penaksir

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman;
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jamianan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam rangka menentukan harga dasar barang yang akan dilelang;
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

c. Pengelola UPS

Pengelola UPS adalah untuk mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan oprassional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan. untuk menyelenggarakan fungsi tersebut. pengelola mempunyai fungsi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan oprasional;
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jamianan setelah jatuh tempo;
- 3) Melaksanakan pengawasan secara uji dan terpprogram terhadap barang jaminan yang masuk;
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan oprasional;
- 5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan;
- 6) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamannya.

d. Kasir

- 1) Menaksir barang jaminan nasabah untuk dapat dijadikan dasar peminjaman yang dapat diberikan pada nasabah;
- 2) Mengelola transaksi;
- 3) Menangani bagian wanprestasi;
- 4) Survey lapangan serta penerima uang setoran pengembalian dan pinjaman serta pembiayaan lainnya.

e. Pengelola

Fungsi pengelola adalah mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola mempunyai tugas:

- 1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan
- 2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari menejer atau pimpinan cabang
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman
- 5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Melakukan perhitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.
- 7) Melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain
- 8) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan
- 9) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubik dan bulan kreditnya, serta menyusun sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain
- 11) Melakukan pencatatan dan penambahan atau pengurangan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya
- 12) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁹

¹⁹ Dokumen PT.Pegadaian (Persero) Syariah Unit Payung Sekaki Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²⁰

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²¹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 55

²¹ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.²²

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:²³

- a. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
- b. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjaanya.
- c. Guru bertanggung jawab atas muridnya.

²² ibid

²³ Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
- e. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.²⁴
- f. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.²⁵

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :²⁶

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.²⁷

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang

²⁴ Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵ Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 92

²⁷ *Ibid*, h. 93



dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.²⁸

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.²⁹ Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

1. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.

²⁸ *Ibid*, h. 94

²⁹ E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedingrantaan* (Mandar Maju, Bandung: 2000),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian
3. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
4. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
5. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.³⁰

Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

³⁰ Ibid, h. 95



a. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.³¹

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.³²

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata. Dalam pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Defenisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki kelemahan karna disatu pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya terlalu luas.

Dianggap tidak lengkap karna hanya merumuskan perjanjian sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari disamping perjanjian sepihak juga dapat jumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal

³¹ *Ibid*, hlm 96

³² Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 45



balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercangkup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut.³³

Sebaliknya dikatakan terlalu luas karna perjanjian menurut pasal tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang bersifat hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, misalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji kawin.³⁴ Atas dasar alasan-alasan itulah para sarjana hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian.

Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁵ Sedangkan Abdul Khadir Muhammad menyatakan perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.³⁶

Selanjutnya kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III BW.

³³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung : Mandar Maju, 1994), h.15

³⁴ Ibid, h.46

³⁵ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak* (Yogyakarta : Cakrawala, 2012), h.8

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h.224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul dari para pihak didalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Karna perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.³⁷

Wujud perjanjian dibagi dua jenis yaitu :

- a. Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitan dengan tindakan dan harta kekayaan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti dipengadilan dan memiliki kekuatan hukum mengikat kepada kedua belah pihak.
- b. Perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Tidak memiliki kekuatan hukum karna bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian. Oleh karna itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran para pihak yang semula menaruh saling percaya untuk mengikatkan dirinya dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.³⁸

Pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi). Dengan demikian memungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling timbal balik. Debitur pada sisi menjadi kreditur

³⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2002), h,28

³⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), h.122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitur dan pihak lain yang menjadi kreditur yang berhak atas pelaksanaan prestasi tersebut.³⁹

2. Asas-asas Perjanjian

Asas dalam perjanjian adalah pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang dibuat sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Suatu perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Dalam menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdara diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Berikut ini asas-asas dalam Hukum Perjanjian:

a. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis atau dengan akta notaris (perjanjian penghibaan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar meukar, sewa menyewa adalah perjanjian yang konsensuil.⁴⁰

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berate hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴¹ Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), h. 15

⁴¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), h.9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.⁴²

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta Sunt Servanda berarti bahwa “Perjanjian itu mengikat”. dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukkan kedalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata Indonesia.⁴³

e. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan

⁴² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung : Pustaka Setia, 2004),

⁴³ Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.182



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan debitur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁴⁴

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku KUHP Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk syahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHP Perdata). Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di dalam Hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUHP Perdata atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHP Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP Perdata. Yang

⁴⁴ Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h.88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain.

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya
- 5) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.⁴⁵

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

⁴⁵ Salim, Hukum Perjanjian, *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.⁴⁶

c. Adanya Objek Perjanjian

Mengenai adanya objek perjanjian, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. sesuai pasal 1313 ayat (1) BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Ayat (2) Menyatakan tidaklah

⁴⁶ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau dihitung. Maksud dari pasal 1313 BW tersebut adalah barang yang dijadikan objek perjanjian harus tertentu dan jelas atau setidaknya harus ditentukan jenisnya.

d. Adanya Kausa yang halal

Pasal 1320 ini menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk melahirkan suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Gadai

1. Pengertian Gadai

Di dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu salah satunya adalah gadai.⁴⁸ Mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang mana definisi gadai adalah:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari penerima gadai-penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 152

⁴⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Bandung: Liberty, 1981), h. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari definisi gadai dalam Pasal 1150 KUHPdata jelas terlihat bahwa gadai adalah suatu hak atas benda bergerak milik orang lain, yang tujuannya hanya sebagai jaminan tertentu bagi suatu pemenuhan suatu tagihan dari macam apapun. Jadi benda itu merupakan jaminan pelunasan bagi pemenang gadai.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu:

- 1) Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang
- 2) Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya
- 3) Objek gadai adalah barang bergerak
- 4) Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada debitur (dalam kekuasaan kreditur)

Dari ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, ada 2 (dua), yaitu pihak berutang (pemberi gadai/debitur) dan pihak berpiutang (penerima gadai/kreditur).⁴⁹ Definisi gadai dalam Pasal 1150 dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).⁵⁰

⁴⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2007), h. 43

⁵⁰ Gunawan widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Syarat Sah Perjanjian Gadai

Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut:⁵¹

1) Harus ada perjanjian gadai

Hak gadai di dasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.⁵² Bentuk perjanjian itu tidak di syaratkan apa-apa dalam KUHPerdato. Persetujuan atau perjajian gadai (pand-overeenkomst), berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdato menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.

2) Benda gadai harus di serahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai

Walaupun perjanjian atau persetujuan gadai (pand-overeenkomst) telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai bisa terjadi jika barang gadai sudah diserahkan ke tangan si pemegang gadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdato yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang- piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak sah jika hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Titik berat terjadinya

⁵¹Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984), h.57

⁵² ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadai adalah barang harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai. Cara penyerahan benda gadai berbeda-beda, tergantung kepada jenis benda gadainya. Jika benda gadai berwujud atau bertubuh maka dapat dilakukan penyerahan secara fisik atau secara nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara. Sedangkan terhadap benda gadai bergerak tidak berwujud atau bertubuh, yang berupa macam-macam hak tagihan, maka penyerahannya dilakukan dengan surat-surat piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUHPerdara.

2. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
- b. Hak dan Kewajiban Pemberi gadai (*Rahin*)
 - 1) Pemebri gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
 - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
 - 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁵³

D. TINJAUAN UMUM JAMINAN

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitor terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 angka (23) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah :

"Jaminan tambahan diserahkan debitor kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah."

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan diserahkan oleh debitor kepada bank. Jadi unsur-unsur dari agunan adalah :

- a. Jaminan tambahan;
- b. Diserahkan oleh debitor kepada bank;
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah :

⁵³ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”⁵⁴

Jadi komponen dari jaminan atas definisi di atas adalah :

- a. Pemenuhan kewajiban kepada kreditor;
- b. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditor.

Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”⁵⁵

Alasan digunakan istilah jaminan adalah :

- a. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.
- b. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang- Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Jaminan materil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan

⁵⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: Liberty. 2004). h.50

⁵⁵ M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005). h. 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dialihkan. Jaminan inmateril (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.⁵⁶ Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang di atur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah di ubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku adalah :

1. Gadai
2. Hak Tanggungan
3. Jaminan Fidusia
4. Borg
5. Tanggung-menanggung
6. Perjanjian garansi

⁵⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata. Hak Jaminan Atas Tanah* . (Jakarta: Liberty, 1981). h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan hipotik dan creditverband sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminakan pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminakan adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah :⁵⁷

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

2. Kedudukan dan Manfaat Jaminan

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditor maupun debitur. Manfaat bagi kreditor ialah :

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditor

⁵⁷ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), h.73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan untuk kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian bagi pihak kreditur maupun debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Di samping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian berusaha, karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila debitur tidak mampu dapat mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Nilai benda jaminan biasanya pada saat dilakukan taksiran nilainya lebih tinggi, jika dibandingkan pokok dan bunga yang tertunggak.⁵⁸

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua (2)

macam, yaitu :

1. Perjanjian pokok yaitu perjanjian yang melahirkan utang piutang antara debitor dan kreditor, perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.
2. Perjanjian *accessoir*; Perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Misal perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan

⁵⁸ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996) ,hlm.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi sifat perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang, maka sebagai perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Perjanjian jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian *assesoir*. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan ketentuan bahwa debitur dan kreditor secara bersama-sama, berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang tertentu kepada kreditor (sebagai penerima fidusia), untuk menjamin pelunasan seluruh utang debitur tersebut.⁵⁹

Hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan perikatan yang sumbernya adalah perjanjian. Berdasarkan hubungan ini, kreditor berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan (secara

⁵⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan*, (Bandung : T Alumni, 2006), h.230



constitutum possessorium) dari debitor, yang berkewajiban memenuhinya. Jadi perikatan jaminan fidusia merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitor menyerahkan suatu barang (*secara constitutum possessorium*) kepada kreditor. Perikatan penjaminan fidusia merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Perjanjian jaminan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Salah satu anggota masyarakat yang kurang mampu membutuhkan pinjaman uang kepada salah seorang masyarakat yang tingkat ekonominya lebih tinggi. Pinjaman seperti ini biasanya dilakukan cukup secara lisan. Misalnya, A ingin mendapatkan pinjaman dari B, maka A cukup menyerahkan surat tanahnya kepada B. Setelah surat tanah diserahkan, maka uang pinjaman diserahkan oleh B kepada A. Sejak terjadinya konsensus di antara kedua belah pihak itulah saat terjadinya perjanjian pembebanan jaminan. Sedangkan perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan nonbank maupun oleh lembaga pegadaian. Perjanjian pembebanan ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan atau autentik. Biasanya perjanjian pembebanan jaminan dengan menggunakan akta di bawah tangan dilakukan pada lembaga Pegadaian.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan*, (Bandung : PT Alumni, 2006), h.238



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu". Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Sedangkan menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:

"Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditor-*eigenaar*"⁶¹

⁶¹ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Indonesia. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1987). h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peranan Jaminan Fidusia

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat⁶²

Kekurangan dan hambatan yang terkandung dalam gadai (pand) meliputi :

- a. Adanya asas inbezitstelling; Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, dan lain sebagainya. Mereka di samping memerlukan kredit, masih memakai benda tersebut sebagai alat untuk bekerja.
- b. Gadai atas surat-surat piutang; Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena :
 - 1) Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai;
 - 2) Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang

⁶² Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. (Jakarta: Liberty, 1982). h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitor surat utang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitor surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan;

- 3) Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditor terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditor lain, yaitu pemegang hak privilege dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Dengan demikian dengan adanya berbagai kelemahan di atas, mengakibatkan timbulnya lembaga baru, yaitu fidusia. Pada awal perkembangannya di negara Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi, karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang diperkenankan. Namun dalam perkembangannya Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. Arrest ini terkenal

dengan Bierbrouwerij Arrest. Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum P.A Stein berpendapat bahwa :

Adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga tersebut di mana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;

Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditor, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitor, sedangkan fidusia justru benda bukan haknya debitor;

Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk Undang-Undang bahwa sebagai jaminan utang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitor;

- d. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);

Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal. Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 (*BPM-Clynet Arrest*). Lahirnya arres ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya Arres ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.⁶³

Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum di atur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketiga hal tersebutlah yang melandasi perlu dibentuknya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.⁶⁴

⁶³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan*, (Bandung: PT Alumni, 2006), h.247

⁶⁴ Ibid. h. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban Pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak Pegadaian.
2. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang timbul oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Mengenai batalnya perjanjian yaitu suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati, maka bisa berkaitan kepada batalnya perjanjian. Pembatalan bisa dibedakan menjadi 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu: Null and Void, syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum dan Voidable, bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya batal bukan demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SARAN

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pegadaian diharapkan agar lebih waspada lagi setelah kejadian hilangnya barang jaminan gadai nasabah, dan agar lebih mensosialisasikan mengenai produk-produk dan keberadaannya kepada masyarakat yang lebih luas. Sehingga masyarakat akan lebih mengenal Pegadaian Syari'ah. Selain itu juga, hendaknya memberikan informasi kepada nasabah bahwa barang jaminan di Pegadaian diasuransikan.
2. Kepada nasabah diharapkan agar selalu meminta penjelasan kepada pihak Pegadaian baik dalam tata cara pelunasan, perjanjian gadai ataupun terhadap keamanan barang jaminan yang dititipkan, agar nantinya jika terjadi hal yang diluar kemampuan pihak pegadaian nasabah bisa memahami dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Abdul R.Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Medi, 2010
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Mulia, 2007
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Gunawan widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984
- Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2013
- Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak Dan Panduan Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta : Cakrawala, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009

Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004

Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan, 1996

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perukatan*. Bandung : Mandar Maju, 1994

Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 2004

Salim Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Gafika, 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satrio. J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung ; Citra

Aditya Bakti, 2002

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Bandung:

Liberty, 1981

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1987

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,

2011

Supranto, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta,

2003

Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana

Media, 2012

Veithzal Rivai, *Bank atau Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2007

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan*

Dalam Islam, Bandung ; Pustaka Setia, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Bale, 1990

Zainudin Ali. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUCI RAHMAWATI
 NIM : 11427203865
 Program Studi: ILMU HUKUM
 Judul : Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru
 Pembimbing : Firdaus, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2020



Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/629/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Februari 2020

Kepada

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah UPS Payung Sekaki Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI RAHMAWATI
NIM : 11427203865
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah UPS Payung Sekaki Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP
HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)
SYARIAH UPS PAYUNG SEKAKI PEKANBARU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Des. H. Hajar., M.Ag
NIR 19580712 198603 1/005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Pegadaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2020

Nomor : 067/00102.06/2020
Lampiran : -
Urgensi : **B**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SUSKA RIAU
Di

PEKANBARU

Perihal : Mohon Izin Riset

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/629/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal **Mohon Izin Riset** dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa dalam rangka menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dalam menyelesaikan studinya, Saudara tersebut dibawah ini diberikan izin untuk melakukan Riset di UPS Payung Sekaki Pekanbaru:

NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL SKRIPSI
Suci Rahmawati	11427203865	Ilmu Hukum	"Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadaai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Payung Sekaki Pekanbaru"

- Sebelum dan selama dilaksanakannya Riset, yang bersangkutan diminta :
 - Melapor dan berkoordinasi dengan Pengelola UPS Payung Sekaki Pekanbaru terkait dengan Penelitian dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan;
 - Menggunakan salah satu produk PT. Pegadaian dan menginstall Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) pada *Handphone* pribadi yang nantinya dipandu oleh petugas kami di UPS Payung Sekaki Pekanbaru;
 - Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unit Pegadaian Syariah Payung Sekaki Pekanbaru dan **diwajibkan** untuk memakai *atribute* atau jaket almamater;
 - Menjaga kerahasiaan Perusahaan **dilarang keras** untuk memberikan data nasabah kami kepada pihak lain, dan semua data yang diperoleh tidak diperkenankan untuk dipublikasikan kecuali semata-mata hanya untuk kepentingan studi;
 - Menyerahkan copy 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian tersebut kepada Pengelola Unit Pegadaian Syariah Payung Sakaki Pekanbaru berikut bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan salah satu produknya PT Pegadaian (Persero).

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kantor Wilayah II Pekanbaru
An. Pemimpin Wilayah
Deputy Operasional

MOHAMAD IHSAN PALALOI
Vice President

Tembusan:

- Sdr. Pemimpin Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) di Ahmad Yani Pekanbaru.
- Sdr. Pengelola Unit Syariah PT. Pegadaian (Persero) di Payung Sekaki

PT. PEGADAIAN (Persero) - Kantor Wilayah II Pekanbaru

Jl. Tuanku Tambusai Ujung T +62 761 5970055
Pekanbaru-Riau 281292 F +62 761 5970044

www.pegadaian.co.id



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Suci Rahmawati, dilahirkan di Sumatera Barat tepatnya di Koto Tuo, pada tanggal 23 Agustus 1995. Anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Ayahanda Dedi Trialdo dan Ibunda Teti Susilawati. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiah Bustanul Athfal di Koto Tuo pada tahun 2001 dan melanjutkan ke Sekolah Dasar di SDN 014 Dumai dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2008. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Dumai, dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Dumai, dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama mengikuti perkuliahan penulis juga melaksanakan kegiatan magang di kantor Imigrasi Kela II Kota Dumai pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Bantan, Desa Berancah, Kabupaten Bengkalis. Dan pada tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi **Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru** Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 11 Mei 2020 dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.